

EDISI KHUSUS 1 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO

TEMPO 34

KONSOLIDASI INDONESIA TERPIMPIN

20-26 OKTOBER 2025

RP 60.000

TEMPO.CO/MINGGUAN
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273





28

EDISI KHUSUS

TAHUN
PEMERINTAHAN
PRABOWO

Susah Sinyal Komunikasi Istana

SEKELILING yang di lingkaran Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan jalur komunikasi ke kerak di lapangan. Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya diduga sengaja menyebarkan informasi yang bisa merugikan Prabowo. Pola komunikasi seperti itu menghambat kinerja pada waktu krisis, dan ketergantungan Prabowo kepada personel militer.

58

EKONOMI & BISNIS

Konsolidasi Berbuah Ketidakpastian

SELAMA setahun masa pemerintahannya, Prabowo Subianto mengkonsolidasikan berbagai sumber daya ekonomi. Badan usaha milik negara diatur di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan ekonomi desa dikendalikan koperasi merah putih. Kekuatan fiskal difokuskan untuk mendanai proyek-proyek favoritnya, sementara otoritas moneter kian kehilangan independensi. Pelbagai kebijakan ekonomi menimbulkan keresahan.

42

HUKUM

Reformasi Aparat Jalan di Tempat

PELBAGAI persoalan hukum mewarnai setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Banyak kasus korupsi diungkap aparat penegak hukum, tapi ujungnya diduga untuk mengkriminalkan atau mengganti pemain semata. Reformasi aparat penegak hukum jalan di tempat. Sejumlah kebijakan berpotensi menyuburkan korupsi.

82

LINGKUNGAN

Harga Mahal Proyek Swasembada

ALIH-ALIH meningkatkan kemandirian, proyek swasembada pangan Prabowo Subianto memicu kerusakan sosial-ekologi. Ambisi swasembada pangan, energi, dan air juga berisiko mengorbankan 20 juta hektare kawasan hutan. Proyek cetak sawah gagal panen. Pun ambisi swasembada pangan malah mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

NASIONAL
Ringkasan 22OPINI
Bahasa 104
Kolom 96
Marginalia 106
Opini 24URBAN
Poker & Tokoh 98
Wawancara 100PRELUDE
Surat 8
Kartun 10
Album 12
Angka 20
Seribu Kata 14INTERNASIONAL
Internasional 74



BIROKRASI KOMANDO MINIM KOORDINASI

SATU ungkapan ringkas yang menggambarkan setahun pemerintahan Prabowo Subianto adalah birokrasi komando dan minim koordinasi.

Prabowo justru memperlihatkan watak kepemimpinan yang menggeli-sahkan: keputusan makin terpusat, komunikasi makin menyempit pada pejabat tertentu saja, dan koordinasi di tingkat pelaksana yang makin lamban.

Ini terjadi pada banyak—untuk tidak menyebutnya semua—program prioritas. Dari makan bergizi gratis yang diwarnai kasus keracunan massal serta konflik kepentingan kepemilikan dapur penyedia, sekolah rakyat yang dipaksakan tanpa kesiapan fasilitas dan tenaga pengajar, hingga koperasi desa merah putih yang rawan politisasi.

Singkatnya, dalam mengejar pelaksanaan program prioritas, pemerintahan Prabowo tak merencanakan dengan menyeluruh, sasarannya tak akurat, implementasinya tambal-sulam, dan evaluasinya asal-asalan. Kesan yang muncul adalah pokoknya program berjalan dulu dan jika ada masalah bisa ditangani atau dibatalkan di kemudian hari.

Matinya ekologi pengambilan keputusan

Para menteri, pejabat tinggi, dan kepala lembaga kini harus melalui jalur yang sangat terbatas hanya untuk menyampaikan laporan kepada Presiden. Bahkan laporan itu mesti disaring: mana yang “menyenangkan” atau tak menggembirakan bagi Presiden. Akibatnya, Presiden mungkin hanya mendengar laporan yang baik sehingga tidak peka ketika ada persoalan di lapangan.

Jika situasi ini terus dibiarkan, negara yang ingin tampil kuat justru akan kehilangan daya dengarnya dan dengan sendirinya daya koordinasi makin lemah. Ini penting diperhatikan Presiden Prabowo karena kemacetan itu bukan hanya pada jalur laporan, melainkan juga seluruh ekologi pengambilan keputusan pemerintahan.

Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi bukan hanya soal siapa bicara apa, kapan, dan kepada siapa, melainkan juga soal mekanisme birokrasi membangun pembelajaran kolektif sebagai mesin pemerintahan. Di sinilah birokrasi membangun kemampuan membaca situasi, menilai risiko, dan menyesuaikan arah kebijakan.

Pada waktu aliran komunikasi tersumbat, kemampuan beradaptasi menjadi lenyap. Kebijakan pun kehilangan konteks. Informasi yang seharusnya menjadi darah yang menghidupi tubuh pemerintahan berubah menjadi saringan yang menentukan siapa yang boleh bicara dan siapa yang tidak.

Kita melihat gejalanya dalam setahun pemerintahan Prabowo. Koordinasi lintas kementerian tersendat dalam berbagai situasi krisis karena kementerian menunggu sinyal politik dan keputusan “dari atas”.

Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* (1975) dan kuliahnya tentang *Security, Territory, Population* (1977-1978) mengingatkan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya lewat paksaan, melainkan juga lewat pengaturan pengetahuan. Konsep disiplin tidak selalu berarti perintah, tapi juga mekanisme kontrol terhadap apa yang boleh diketahui dan dikatakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, ketegasan menjelma menjadi teknologi kuasa. Ini adalah cara halus mengatur sirkulasi informasi dan menanamkan rasa takut akan kesalahan. Para pejabat tak lagi diatur oleh instruksi keras, tapi oleh ketidaktaatan yang dibuat terstruktur. Kontrol terhadap pengetahuan akan mempengaruhi kontrol terhadap tindakan. Kekuasaan tak lagi hadir dalam teriakan perintah, tapi dalam senyap yang membuat semua pejabat berhitung sebelum berbicara.

Fenomena ini disebut Antonio Gramsci dalam *Prison Notebooks* (1929-1935) sebagai statisme otoritarian, yakni negara tampak makin kuat di luar tapi melemah di dalam. Dalam situasi seperti itu, hegemoni negara bekerja bukan dengan memaksa, melainkan dengan meniadakan alternatif.

Kesetiaan menjadi nilai tertinggi, menggantikan argumentasi dan deliberasi. Birokrasi kehilangan otonomi profesionalnya. Ia tak lagi menjadi arena diskursus kebijakan, tapi sekadar rantai kepatuhan. Negara memang terlihat kokoh, tapi kekokohan itu rapuh karena bertumpu pada keseragaman, bukan konsensus yang hidup. Dalam politik seperti ini, masyarakat tidak lagi menjadi subyek yang diajak berpikir bersama, tapi menjadi obyek yang diatur agar tidak banyak bertanya.

Jürgen Habermas menawarkan jalan keluar normatif untuk memulihkan rasionalitas publik, yakni melalui percakapan yang terbuka. Dalam masyarakat modern, komunikasi yang bebas dari dominasi dapat me-



Yanuar Nugroho,

Pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta,
dan Deputi II Kantor Staf Presiden 2015-2019

mengembalikan kemampuan negara berpikir dan belajar bersama warganya.

Habermas dalam *The Theory of Communicative Action* (1981) dan *Between Facts and Norms* (1992) menulis rasionalitas publik hanya lahir dari percakapan terbuka. Legitimasi politik modern tidak bisa diperoleh semata-mata dari otoritas, tapi dari argumentasi yang dapat diuji publik. Namun, dalam sistem komunikasi yang tertutup, kebijakan publik kehilangan ruang ujian. Ia tak lagi menjadi hasil perdebatan rasional, tapi keputusan sepihak yang dibungkus jargon efisiensi.

Gagasan-gagasan Foucault, Gramsci, dan Habermas ini bukan sekadar teori tentang kekuasaan, hegemoni, dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia hari ini, ketiganya menjadi cermin: tanpa disiplin yang reflektif, hegemoni yang inklusif, dan komunikasi yang terbuka, negara hanya akan menjadi ruang gema atas komando Presiden.

Akibatnya adalah efisiensi yang dijanjikan justru melahirkan kebekuan. Di tengah krisis yang memerlukan respons cepat dan lintas sektor, birokrat memilih diam. Mereka menunggu sinyal ketimbang mengambil inisiatif.

Dalam situasi ketidakpastian dan krisis yang amat mungkin akan kita hadapi, seperti krisis pangan dan energi, sikap diam ini mematikan. Bukan karena para pejabatnya tidak kompeten, melainkan lantaran mereka dibentuk untuk tidak berani bertindak sebelum diperintah. Menteri menunggu izin untuk melapor dan kebijakan tertahan karena belum ada restu. Negara tersandera oleh hierarki yang dibangunnya sendiri.

Fokus pada kerja yang berdampak

Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif tidak selalu yang paling keras memerintah, tapi yang paling luwes berkoordinasi. Michael Barber, arsitek *delivery unit* (unit kerja) di Inggris pada masa Perdana Menteri Tony Blair, pernah mendalilkan keberhasilan pemerintahan terletak pada kemampuannya mengelola data dan informasi, merespons hasil evaluasi, serta memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Konsep *delivery* atau kerja yang berdampak bukanlah tentang instruksi, melainkan tentang sistem yang belajar. Ia membutuhkan mekanisme umpan balik yang hidup, bukan rantai komando yang beku.

Di Indonesia, gagasan mewujudkan kerja yang berdampak pernah hidup dalam bentuk unit koordinasi

kebijakan lintas kementerian. Unit khusus ini menjadi ruang tempat data, ide, dan masukan bisa bertemu.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh yang dibentuk setelah bencana tsunami pada 2004. Yudhoyono kemudian membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4. Lembaga ini menjadi *delivery unit* pertama di Indonesia yang langsung berada di bawah presiden. Tugasnya memastikan janji politik presiden tercapai melalui program prioritas.

Joko Widodo meneruskan gagasan mengenai kebutuhan *delivery unit* dengan membentuk Kantor Staf Presiden. Lembaga ini menjadi mesin koordinasi mewujudkan janji politik Nawacita. Sayangnya, semangat mewujudkan kerja yang berdampak itu mulai pudar ketika logika kekuasaan mengalahkan teknokratisme koordinasi dan pengendalian pembangunan.

Ini terjadi pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Dia mengedepankan kepentingan politik dan menanggalkan substansi pembangunan. Begitu pula pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ketika komunikasi dimonopoli oleh orang-orang tertentu dan politik komando diterapkan sehingga membuat aspek kerja berdampak itu tak bersisa hari-hari ini.

Prabowo mesti kembali belajar mendengar. Dia harus membuka arus komunikasi sehingga arus informasi mengalir di pemerintahan sampai ke Presiden tanpa rasa takut. Prabowo mesti membangun koordinasi deliberatif dengan membuka ruang dialog dalam pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar komando.

Yang tak kalah penting adalah kepemimpinan reflektif. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang tak banyak mengeluarkan instruksi, tapi yang sabar mendengar berbagai pandangan sebelum memutuskan. Ini syarat teknis pemerintahan yang efektif menghadapi kompleksitas persoalan publik.

Pemerintahan modern seharusnya menjadi ruang belajar, bukan sebagai mesin komando. Di era disrupsi yang serba cepat, pemerintahan membutuhkan kepekaan dan fleksibilitas—dua hal yang mustahil bisa tumbuh tanpa komunikasi terbuka. Para pejabat sepatutnya tidak takut berbeda pandangan karena perbedaan justru sumber pengetahuan baru. Sebaliknya, dalam pemerintahan yang beku, keseragaman menjadi bentuk baru kebodohan kolektif. ❶